



# Perang Dokumen Secara TETE

**B**erita perebutan pengaruh untuk pemilihan aplikasi perangkat lunak di lingkungan pemerintahan semakin seru. Hal ini menunjukkan bahwa badan pemerintah adalah lokomotif besar penggerak arah yang dipilih dalam mengembangkan perangkat lunak di suatu negara. Pemilihan format dokumen dan data serta lisensi yang dipilih pun akan sangat menentukan ketergantungan pemerintah terhadap satu vendor perangkat lunak di masa mendatang. Bila pemilihan format dokumen tidak tepat, maka di masa mendatang akan membutuhkan biaya yang besar untuk mengonversinya ke format yang lebih baik.

Beberapa negara tidak ingin terjebak di dalam hal itu. Pemerintah Peru baru saja mensahkan UU tentang kewajiban penggunaan perangkat lunak *open source* di badan pemerintah. Negara kecil seperti Peru saja berani mengeluarkan keputusan seperti itu. Apakah kemampuan SDM Peru sudah demikian lebih majunya ketimbang Indonesia sehingga berani memilih langkah yang membutuhkan kemandirian itu?

Negara-negara Eropa sudah sejak dulu memasukkan persyaratan format data tersebut, dengan standar yang disebut *Open Document Architecture* yang awalnya dikembangkan oleh European Computer Manufacturers Association (ECMA) di tahun 1985, dan dirilis kembali di tahun 1989 sebagai ISO 8613 Office. Tujuan standar ini adalah interoperabilitas antarbadan pemerintah dan antaraplikasi. European Union (EU) merekomendasikan format Open Document yang ditentukan dalam standar OASIS.

Norwegia jelas-jelas telah menolak penggunaan format *proprietary* di dalam dokumen yang dirilis oleh badan pemerintah. Keputusan ini sejalan dengan keinginan untuk menerapkan rekomendasi open source di badan pemerintah pada 2005. Pada 2006 diharapkan setiap badan di Norwegia harus telah memiliki rencana penerapan open source dan Open Document. Rencana ini berkaitan dengan restrukturisasi pola komunikasi badan pemerintah dengan rakyat, yang akan berbasiskan TI di masa depan.

Di USA pun terjadi hal sejenis. Divisi TI Massachusetts baru saja membuat keputusan penggunaan format Open Document di semua aplikasi office (*wordprocessor*, *spreadsheet*, dan *presentasi*). Keputusan

ini memiliki konsekuensi penggunaan format terbuka yang bebas dari penguncian salah satu vendor. Kebijakan tersebut dikarenakan beberapa alasan. Pertama agar proses penggunaan informasi antar badan pemerintah dapat lebih mudah dilakukan. Kedua, menjamin akses dan integritas dokumen. Ketiga, memungkinkan dokumen disebarkan secara cepat pada kondisi darurat.

Jelas keputusan format Open Document menjadikan format MS Office yang walaupun sudah menggunakan XML dianggap belum cukup memenuhi syarat, dan menyebabkan banyak badan pemerintahan yang meninggalkan MS Office. Karena pada format MS Office, XML tetap menggunakan objek *biner* dari aplikasi tertentu, serta lisensi yang diterapkan tidaklah membebaskan pihak lain mengembangkan aplikasi saingan.

Salah satu dorongan penggunaan Open Document adalah agar lebih dari satu vendor (tidak monopoli) yang dapat memberikan solusi ketika ada proyek di pemerintahan. Beberapa format dokumen

proprietary memiliki keterbatasan untuk bisa dibuka dan dimanfaatkan oleh aplikasi lain dalam *platform* lain. Begitu juga memiliki masalah dalam kompatibilitas antarversi-nya sendiri.

Ada dua pelajaran yang dapat ditarik dari perkembangan ini. Pertama, pembuatan keputusan untuk badan pemerintahan, baik rancangan keputusan,

tanggapan, atau keberatan dari suatu keputusan, dilakukan secara TETE (TErtulis dan TErbuka). Sehingga masyarakat bisa menilai alasan keputusan sesungguhnya. Bukan seperti selama ini, kesepakatan di belakang layar secara diam-diam dengan vendor (misal pemberian discount ataupun janji bantuan) lebih diutamakan.

Kedua, faktor pemilihan platform dan lisensi perangkat lunak bukanlah sekadar masalah teknis dan ekonomis, tapi juga politis. Pemilihan lisensi terutama untuk data pemerintahan yang notabene data publik berkaitan dengan penguasaan data. Data milik publik yang dikelola pemerintah sudah selayaknya mempertimbangkan azas kepemilikan data tersebut. Bahwa badan pemerintah tersebut tidak terikat oleh entitas luar, sudah selayaknya menjadi pertimbangan saat ini. Jangan sampai di masa mendatang, untuk mengolah data milik kita sendiri, harus meminta izin perusahaan tertentu, hanya karena lisensi dimiliki perusahaan tersebut. ♪

**Beberapa format dokumen *proprietary* memiliki keterbatasan untuk dibuka dan dimanfaatkan...**